

Penerapan ISAK 35 dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nonlaba (Studi kasus pada Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Zaitun)

Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat

DOI

10.58784/mbkk.53

Keywords

accountability

financial statements

qualitative characteristics-
of accounting information

JEL Classification

M41

M48

Received 13 October 2023

Revised 24 November 2023

Accepted 22 February 2024

Published 16 January 2025

Novi Swandari Budiarmo

Corresponding author: novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University - Indonesia

Djeini Maradesa

Sam Ratulangi University - Indonesia

ABSTRACT

Entitas berorientasi nonlaba mendapatkan sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pengembalian, namun akuntabilitas tetap harus diterapkan guna pengambilan Keputusan yang tepat. Penilaian akuntabilitas dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan ISAK 35 terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data internal dan eksternal, selanjutnya berdasarkan data tersebut dibuat analisis penilaian akuntabilitas berdasarkan 5 indikator. Selanjutnya dibuat analisis atas laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh adalah GPdI Bukit Zaitun perlu membuat Standar Operasional Prosedur dan menerapkan ISAK 35 karena dapat mendorong akuntabilitas terhadap pemberi sumber daya dan penilaian akuntabilitas internal guna pengambilan keputusan

©2025 Novi Swandari Budiarmo, Djeini Maradesa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

ISAK 35 memberikan pedoman penyajian atas laporan keuangan entitas nonlaba dan mengatur bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian ketika menyajikan laporan keuangannya berdasarkan kondisi entitas tersebut. Karakteristik utama yang membedakan entitas nonlaba dan entitas

bisnis adalah cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya guna melaksanakan aktivitas operasional. Sumber daya yang diperoleh entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik atas aktivitas tersebut. Meskipun demikian bukan berarti entitas berorientasi nonlaba terlepas dari akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dalam ISAK 35 terkait kepentingan pengguna laporan entitas nonlaba yaitu untuk menilai cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, selain informasi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan dapat dilihat dalam laporan keuangan entitas. Namun pada umumnya entitas berorientasi nonlaba hanya menyajikan pembukuan yang merupakan bagian kecil dari laporan keuangan berupa laporan kas masuk dan kas keluar (Andy dan Purba, 2024; Apriliana, 2024; Diviana et al., 2020; Dwikasmanto, 2020; Maulana dan Rahmat, 2021; Simanjuntak dan Purba, 2024), sehingga sulit bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Tanggung jawab berhubungan erat dengan akuntabilitas karena akuntabilitas menurut Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018) merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggungjawab yang telah diberikan tersebut.

Penelitian tentang ISAK 35 telah banyak dilakukan, namun sebagian besar dilingkup penerapan penyajian laporan keuangan pada yayasan (Dewi dan Herawati, 2023; Malasai, 2024), organisasi keagamaan (Loga dan Puspitosarie, 2024; Rifana et al., 2023; Rompas et al., 2024). Penelitian tentang ISAK 35 dan akuntabilitas dilakukan oleh Juniaswati dan Murdiansyah, 2022, penelitian ini menganalisis akuntabilitas berdasarkan 5 indikator yaitu: *Standard Operating Procedure*, pengawasan internal, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan dan mekanisme evaluasi *punishment and reward*. Penelitian Octisari et al, 2021, menguraikan tentang kriteria akuntabilitas dengan indicator indicator dan kriteria ISAK 35 yang dilihat dari jenis jenis laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tentang pentingnya penerapan ISAK 35 dalam hubungannya dengan pengguna laporan keuangan dalam melakukan penilaian pengelolaan sumber daya, serta masih kurangnya penelitian terkait ISAK 35 dan akuntabilitas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ISAK 35 dalam mendorong akuntabilitas entitas berorientasi nonlaba.

**Tinjauan
pustaka**

Akuntabilitas

Asal-usul kata "akuntabilitas" berasal dari bahasa Latin, yaitu "accomptare" yang memiliki makna dapat diandalkan. Dalam konteks bahasa Inggris, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab terhadap tugas atau kondisi yang telah diberikan (Putri & Ayem, 2021). Halim (2004) menyatakan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dalam hal akuntabilitas, gereja, yang merupakan organisasi keagamaan dan termasuk dalam kategori organisasi nonlaba, tidak hanya harus mempertanggungjawabkan bagaimana dana digunakan, tetapi juga harus mematuhi aturan yang ada, yaitu ISAK 35. Dalam konteks akuntabilitas, pihak yang diberi tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mengekspos, memberikan informasi, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada para pemberi tanggung jawab. Pemberi tanggung jawab memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (A. F. Maulana & Ridwan, 2020).

Dalam studi ini, lima indikator akuntabilitas yang diacu digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas laporan keuangan. Indikator akuntabilitas ini membantu menilai sejauh mana langkah yang diambil sesuai dengan rencana, petunjuk, dan peraturan yang berlaku (Afifah & Faturrahman, 2021): a. Penerapan Standar Operasional Prosedur melibatkan berkas yang memuat petunjuk dan perintah terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kegunaan berbagai divisi dalam suatu perusahaan. b. Sistem pengawasan merupakan cara untuk memantau dan mengikuti kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap departemen dalam suatu organisasi. c. Mekanisme pertanggungjawaban adalah serangkaian langkah-langkah yang menjamin bahwa unit atau tingkatan dibawahnya dapat bertanggung jawab kepada tingkatan atau unit atasannya dalam organisasi. d. Laporan tahunan adalah dokumen yang rinci mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. e. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman adalah suatu mekanisme untuk menilai apakah suatu tugas telah diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas.

Pertanggungjawaban tersebut,". Dalam agama, suatu sistem pencatatan dalam sebuah transaksi sebenarnya telah diperintahkan, walaupun secara implisit, agar kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki

hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Halim & Kusufi, 2017). Akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi yaitu, yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait mengenai adanya penghindaran penyalagunaan jabatan, yang kedua adalah akuntabilitas proses yang menjelaskan bagaimana proses pelayanan yang cepat dalam pemberian respon, yang ketiga adalah akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan yang keempat adalah akuntabilitas finansial yang berarti pertanggungjawaban suatu Lisnaeni, Handoko and Lubis: Unraveling Islamic Social lembaga atau organisasi dalam menggunakan dana secara ekonomis, efisien dan efektif (Silvia & Ansar, 2011)

Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memberikan tugas kepada bawahannya bidang keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan merupakan sebuah tindakan administratif yang berkaitan dengan pencatatan sumber penerimaan dan pengeluaran kas, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber penerimaan dana dalam hal ini penerimaan dana oleh masjid (Purnama, 2012).

Laporan keuangan organisasi nonlaba

Sesuai ISAK 35 Laporan keuangan merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan hasil berbagai tahapan akuntansi selama periode tertentu untuk dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang wajib disusun oleh organisasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK)

Metode riset

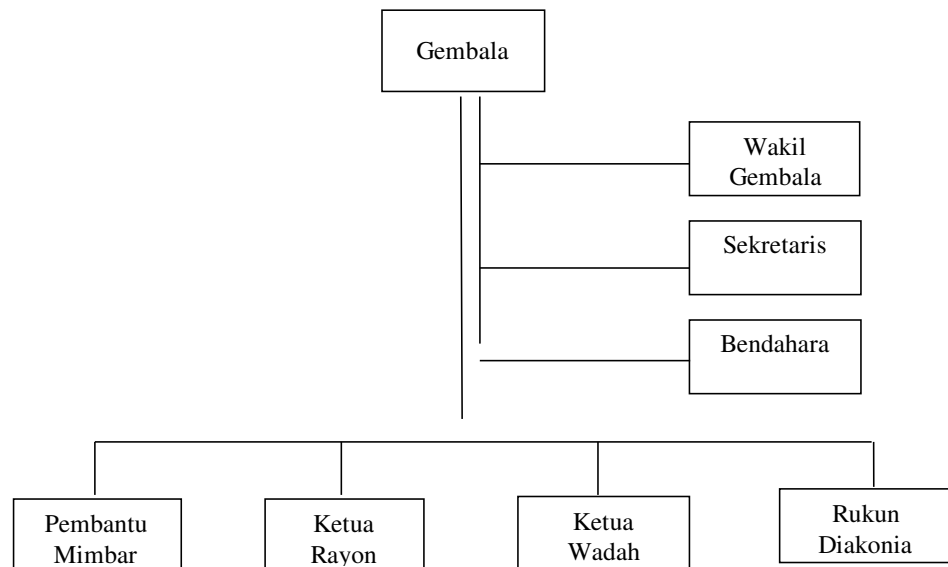
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan penelitian yang membentuk pernyataan berdasarkan perspektif-konstruktif dan perspektif partisipatori atau keduanya Penelitian yang menggunakan pendekatan ini membangun pengetahuan melalui interpretasi berdasarkan perspektif dari subjek yang diteliti (Fiantika et al., 2022). Sumber data untuk membangun interpretasi adalah subjek penelitian sebagai pemilik informasi. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada fenomena sosial berdasarkan kondisi realitas. Metode pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara, dokumen (Murdiyanto, 2020). Tahapan penelitian ini menggunakan tahapan penelitian Miles dan Huberman (1992), yaitu membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel dan dan pembatasan penelitian, instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, matriks dan pengujian kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Struktur organisasi gereja terdiri dari Gembala sebagai pimpinan tertinggi, Pembantu Mimbar, Rayon dan Wadah. Jemaat dibagi dalam 3 Rayon berdasarkan lokasi kediaman jemaat. Struktur organisasi GPDI BZ dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi GPDI BZ

Setiap organ gereja memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan pelayanan organisasi

a. Gembala

Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi pengelolaan pelayanan yang dilakukan pembantu mimbar, Rayon, Wadah, Rukun dan Tim

b. Wakil Gembala

Membantu Gembala dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi pengelolaan pelayanan yang dilakukan pembantu mimbar, Rayon, Wadah, Rukun dan Tim. Jika Gembala berhalangan maka Wakil Gembala akan menggantikan tugas Gembala

c. Sekretaris

Mengurus administrasi gereja yang bersifat internal, termasuk

mengurus berbagai tugas-tugas dokumen seperti perizinan, dan perantara hubungan dengan pihak luar gereja.

- d. Bendahara
Melakukan penatausahaan keuangan gereja serta melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Gembala dan jemaat.
- e. Pembantu Mimbar
Membantu Gembala dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan memberi masukan dan saran kepada Gembala
- f. Ketua Rayon
Mengatur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan ibadah rayon dan kegiatan pelayanan rayon lainnya
- g. Ketua Wadah
Mengatur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan ibadah wadah dan kegiatan pelayanan wadah lainnya
- h. Rukun Diakonia
Mengatur dan bertanggung jawab terhadap pelayanan orang sakit dan meninggal dunia
- g. Panitia *Adhoc* atau Tim
Mengatur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan panitia atau tim sesuai tujuan pembentukan panitia atau tim.

Segi sosial jemaat sangat beragam, berdasarkan tingkat pendidikan jemaat memiliki rata-rata pendidikan yang memadai, karena domisili jemaat berada disekitar kampus Universitas Sam Ratulangi. Jenis pekerjaan yang digeluti sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta dan Pegawai Swasta.

Guna mendapatkan pemahaman awal terkait kondisi dan masalah Mitra maka dilakukan observasi awal ke lokasi Mitra. Hasil observasi awal terhadap Mitra ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Struktur organisasi Mitra belum mengakomodir Sekretaris dan Bendahara Rayon-Rayon dan Wadah-Wadah. Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya dalam suatu entitas. Meskipun gereja masuk ke dalam kategori organisasi nirlaba, tapi tetap dibutuhkan struktur organisasi yang jelas. Jika struktur organisasi suatu entitas tidak ada atau tidak lengkap maka sulit menentukan pembagian kerja, perumusan tujuan, manajemen kerja dan administrasi. Selain itu, Mitra tidak membuat uraian tugas pokok dan fungsi yang terdokumentasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut, sedangkan fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tanpa tugas pokok dan fungsi maka sulit untuk menentukan tugas dan wewenang pihak-pihak yang berada dalam suatu organisasi dan akan berdampak pada

konflik internal organisasi.

Daftar Aset gereja yang terdokumentasi dan di kontrol setiap tahun secara kontinu tidak ada. Aset Mitra pada umumnya memiliki nominal yang sangat besar terutama aset tetap, berupa tanah, gedung dan peralatan elektronik. Data aset dan kondisi aset perlu di kontrol setiap tahun karena aset akan mengalami depresiasi sehingga habis masa manfaat, atau rusak. Hal lain terkait aset Mitra yang perlu diperhatikan adalah aset Rayon Rayon dan Wadah Wadah yang tidak diketahui oleh gembala. Hal ini disebabkan karena Rayo Rayon dan Wadah Wadah memiliki hak otonomi untuk mengelola keuangan masing-masing. Rayon memiliki kewenangan sendiri untuk membeli aset atau peralatan, misalnya alat musik.

Laporan Keuangan masih sangat sederhana, hanya menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Struktur/format laporan keuangan untuk entitas yang berorientasi nonlaba seperti yang terdapat dalam DE ISAK 35 diantaranya meliputi: 1. Laporan Posisi Keuangan, 2. Laporan Penghasilan komprehensif, 3. Laporan Perubahan Aset Neto 4. Laporan Arus Kas, dan 5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Mitra setidaknya harus membuat salah satu jenis laporan keuangan sehingga gambaran kondisi keuangan Mitra dapat dilihat dan dikontrol pada setiap periode.

Pembahasan

Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya dilakukan di GPdI Bukit Zaitun dengan melaporkan laporan keuangan Rayon dan Wadah setahun sekali dalam rapat koordinasi seluruh komponen pimpinan. Namun selain itu setiap wadah dan Rayon melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan melakukan pelaporan dalam periode periode tertentu misalnya setiap minggu atau bulan. Panitia ad hoc yang dibentuk oleh gembala melakukan pertanggungjawaban keuangan setelah selesai melaksanakan kegiatan. Pengelolaan aset gereja masih belum dilaporkan secara berkala dan belum disusun dalam bentuk laporan aset gereja.

Secara teoritis 5 indikator yang dapata dijadikan acuan untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan pada GPdI Bukit Zaitun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi akuntabilitas laporan keuangan

| No | Indikator | Praktik pada objek penelitian |
|----|---|---|
| 1 | Penerapan Standar Operasional Prosedur melibatkan berkas yang memuat petunjuk dan perintah terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kegunaan berbagai divisi dalam suatu perusahaan | Belum dibuat Standar Operasional Prosedur tentang pertanggung jawaban. Pelaksanaan atau mekanisme pertanggungjawaban dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Gembala dan hasil keputusan rapat |
| 2 | Sistem pengawasan merupakan cara untuk memantau dan mengikuti kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap departemen dalam suatu organisasi | Sistem pengawasan hanya berupa permintaan pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun atau pada periode tertentu yang praktiknya hanya dijalankan untuk lingkup rayon atau wadah, sedangkan untuk panitia ad hoc bisa diminta pertanggungjawaban pada akhir kegiatan |
| 3 | Mekanisme pertanggungjawaban adalah serangkaian langkah-langkah yang menjamin bahwa unit atau tingkatan dibawahnya dapat bertanggung jawab kepada tingkatan atau unit atasannya dalam organisasi. | Unit atau tingkatan di bawah pada objek penelitian adalah rayon, wadah dan panitia. Mekanisme yang dilaksanakan hanya pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara kepada pimpinan rayon, wadah atau kepanitiaan |
| 4 | Laporan tahunan adalah dokumen yang rinci mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. | Laporan keuangan tahunan senantiasa dilakukan secara berkala dalam rapat koordinasi pada setiap awal tahun |
| 5 | Sistem pemberian penghargaan dan hukuman adalah suatu mekanisme untuk menilai apakah suatu tugas telah diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas. | Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dalam bentuk penilaian dilakukan hanya sebatas pemberian saran dan tanggapan pada saat pertanggungjawaban keuangan |

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa indikator Penerapan Standar Operasional Prosedur dan sistem penghargaan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, belum diterapkan sepenuhnya. Penilaian sistem pemberian penghargaan dan hukuman harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur dari suatu entitas, jika tidak ada Standar Operasional Prosedur maka tidak dapat dilakukan penilaian.

Jika mengacu pada ISAK 35 maka pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan masih sangat minim karena laporan tersebut hanya dalam bentuk laporan penerimaan kas dan penerimaan kas. Pengambil Keputusan tidak dapat mengambil Keputusan yang akurat berdasarkan laporan ini.

ISAK 35 yang mencantumkan jenis-jenis laporan keuangan yang harus dimiliki oleh entitas yang berorientasi nonlaba, jika diterapkan dapat mendorong akuntabilitas laporan keuangan dan selanjutnya bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Hal ini karena jenis-jenis laporan keuangan tersebut memuat informasi-informasi yang memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi menurut IASB yaitu *relevance* atau relevan dan *faithful representation* atau penyajian yang jujur. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan di dalam satu keputusan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika informasi tersebut memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, serta bersifat material. Penyajian yang jujur terdiri dari komponen *completeness* atau kelengkapan, *neutrality* atau netralitas, serta *free from error* atau bebas dari kesalahan.

Kesimpulan

Hasil penilaian menggunakan 5 indikator akuntabilitas menunjukkan bahwa GPdI Bukit Zaitun perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur, selain sebagai pedoman pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban keuangan dapat menjadi standar penilaian sehingga bisa diidentifikasi hal-hal yang sesuai dengan prosedur atau melanggar prosedur. Penerapan jenis-jenis laporan menurut ISAK 35 dapat mendorong akuntabilitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan karena laporan-laporan tersebut memberikan informasi yang sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi.

Daftar pustaka

- Andy, S., & Purba, S. (2024). Penggunaan ISAK 35 di dalam laporan keuangan organisasi nonlaba pada Gereja Gmi "Anugerah" Simpang Raya. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 24–30.
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/view/4225>.
- Apriliana, R. G., Ulupui, I. G. K. A., & Pahala, I. (2024). Analisis penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi nonlaba pada Gereja HKBP Kutabumi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 381–390.
<https://doi.org/10.21009/japa.0502.10>
- Dewi, N. K. I. P., & Herawati, N. T. (2023). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(2), 286–298.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/61433>.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK

- 35 pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>.
- Dwikasmanto, Y. (2020). Penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis Berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 6(2), 46–64. <https://doi.org/10.53494/jira.v6i2.49>.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118–135. <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>.
- Manik, S., Maksud, M. Y. (2020). Penerapan Akuntansi dan Pengendalian Internal Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja HKBP Perumnas Klender). STIE Indonesia (STEI) Jakarta.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/5335>.
- Loga, W. J. A., Hasan, K., & Puspitosarie, E. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan pada Organisasi Nirlaba Pura Sambi Agung Supto Argo Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2557–2563. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5373>.
- Malasai, F., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan “Pononiungan” Bolaang Mongondow. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 295–304. <https://doi.org/10.58784/mbkk.214>.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan ISAK No. 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *Jafa: Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(1), 63–75. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/1210>.
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249–1253. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1648>.
- Ansari, J. (2021). Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Al - Marhamah Medan). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Rifana, M., Kamilah, & Syahriza, R. (2023). Penerapan ISAK 35

laporan keuangan organisasi nonlaba pada Mts Al Washliyah Pajak Rambai Medan. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 516-524. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/1780>.

- Rompas, D. H., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2024). Implementation of ISAK No. 35 on the presentation of financial statements of non-profit-oriented entities (Study at GMIM Bukit Hermon Malalayang). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 67-73. <https://doi.org/10.58784/cfabr.146>.
- Simanjuntak, R., & Purba, S. (2024). Penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non laba pada Gereja Methodist Indonesia Dolok Nagodang. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(1), 29-34. <https://ejournal.mediainsancreative.org/index.php/jurebis/article/view/6>.
- Setiadi. (2021). Implementasi ISAK 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 94-107.
- Elfaradayanti, E . (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Agung Khairullah. Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Maru', M. N. P. (2015). Evaluasi Laporan Keuangan GPIB Jemaat Tamansari Salatiga Berdasarkan PSAK No 45. Kertas Kerja. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Bijak, F. Antong, Sultan. (2022). Analisis Laporan Keuangan Gereja Toraja Jemaat Sion Palopo Berdasarkan Inteprestasi Standar Akuntansi Keuangan 35. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Lombu, A. D. P. (2022). Analisis Penerapan ISAK 35 Pada Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lolowau Ressorst 14 Nias. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.
- Priyo Hari Adi, P. H., Rizky Sandhi Setyaki, R. S., Gunawan, N. B. A., Odu, J. R., Anggraeni, K. S., Samundu, A. T. M., Sibi, P. A., Nainggolan, F. N. H.(2020). Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Sesuai PSAK No. 45/2011:Pengabdian di Gereja Jemaat Kristus Indonesia Ekklesia Salatiga. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1(1)*, 17 - 24.
- Pontoh, C. R. S. (2013). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45 PADA Gereja BZL. *Jurnal EMBA 1(3)*. Hal. 129-139.
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, Siswanto, A. (2020). ISAK 35 Penyajian Laporan

Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 15(2), Hal.113-132.

Yolanda, A. (2021). Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango. Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Ansari, J. (2021). Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Al - Marhamah Medan). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan